

Abstract

In the city of Malang, there is an anti-corruption social movement based on civil society, this movement has been moving since the post-reform era to be precise in 2000 until now and has been consistently active on the issue of anti-corruption issues. MCW or Malang Corruption Watch in its duties has a function as a social movement that is engaged in advocating for public policy and prevention of political corruption, so this research is very interesting if it is related to cases of political corruption that occurred in Malang City in 2018, namely the arrest of 41 members of the City Council. Malang by the Corruption Eradication Commission regarding the alleged bribery of P-APBD Malang City in 2015. This study used a qualitative research method with a phenomenological approach. In collecting data with in-depth interviews (in-depth interviews). This research is also inseparable from collecting well-known books, journals, websites, and the like related to research. Furthermore, the data is managed using the Nvivo 12 Plus software, with the Crosstab Analysis feature in general sentences from which conclusions are drawn. The results of the study show that the source approach carried out by MCW related to organizational input has been implemented optimally so that in the aspect of the process approach, MCW activities can be sustainable and correlate with the output program created by MCW in fulfilling the aspects of the target approach. It can be concluded that MCW as a non-governmental organization has an effective program in organizing it in the field of the anti-corruption movement. However, there are several things that must be tested in relation to their direct implications for society, namely related to civil society participation, government performance, and during the 2019 legislative elections in Malang. On the implications related to civil society participation, MCW is able to move society from the cognitive, affective, to psychomotor aspects. However, regarding the implications for government performance, MCW is only able to be in the cognitive aspect. It is also not far from the level of the 2019 legislative elections in Malang, MCW is only able to be in the cognitive aspect.

Keywords: Civil Society, corruption, Corruption Prevention

Abstrak

Di kota Malang terdapat gerakan sosial antikorupsi yang berbasis masyarakat sipil, gerakan tersebut telah bergerak sejak pasca reformasi tepatnya pada tahun 2000 hingga sekarang dan telah aktif terhadap isu-isu antikorupsi secara konsisten. MCW atau Malang Corruption Watch dalam tugasnya mempunyai fungsi sebagai gerakan sosial yang bergerak dalam mengadvokasi kebijakan publik dan pencegahan korupsi politik, sehingga pada penelitian ini sangat menarik jika dikaitkan terhadap kasus korupsi politik yang terjadi di Kota Malang pada tahun 2018, yaitu tertangkapnya 41 anggota DPRD Kota Malang oleh KPK terkait dugaan suap P-APBD Kota Malang tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam pengumpulan data dengan wawancara mendalam (in-depth interview). Penelitian ini juga tidak dapat dipisahkan dengan mengumpulkan buku, jurnal, website ternama, dan sejenisnya yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya data tersebut dikelola dengan menggunakan software Nvivo 12 Plus, dengan fitur Crosstab Analysis dalam kalimat-kalimat umum yang kemudian diambil kesimpulannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sumber yang dilakukan oleh MCW berkaitan dengan input organisasi telah dilaksanakan secara maksimal sehingga pada aspek pendekatan proses, aktivitas aktivitas MCW dapat berkesinambungan dan berkorelasi dengan program output yang dilahirkan oleh MCW dalam pemenuhannya pada aspek pendekatan sasaran. MCW sebagai organisasi non pemerintah dapat disimpulkan mempunyai program yang efektif dalam pengorganisasiannya di bidang gerakan antikorupsi. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diuji berkaitan dengan implikasinya terhadap masyarakat secara langsung, yaitu terkait dengan partisipasi masyarakat sipil, kinerja pemerintah, dan saat pemilu legislatif 2019 di kota Malang. Pada implikasi terkait partisipasi masyarakat sipil, MCW mampu menggerakkan masyarakat dari aspek kognitif, afektif, hingga kepada psikomotorik. Akan tetapi terkait implikasinya terhadap kinerja pemerintah, MCW hanya mampu berada pada aspek kognitif saja. Hal tersebut juga tidak jauh pada tataran pemilu legislatif 2019 di kota Malang, MCW hanya mampu berada pada aspek kognitif saja.

Kata Kunci: Masyarakat Sipil, korupsi, Pencegahan Korupsi